

2019



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
JALAN LAWU NO. 168 TEGALGEDE KARANGANYAR 57714
(0271) 495059, 495226 Fax. (0271) 495102

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT "Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019" dapat disajikan dalam bentuk dokumen. Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan ini merupakan media untuk menggambarkan situasi dan kondisi pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Karanganyar serta media untuk menyajikan informasi yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan pencapaian kinerja dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Data yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen Profil Sumber Daya Kesehatan Manusia ini bersumber dari berbagai unit kerja di dalam lingkungan sektor Kesehatan yang sudah dilakukan validasi melalui pemutakhiran data menggunakan sistem aplikasi online Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (si-sdmk).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019. Kritik dan Saran sangat kami nantikan agar Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun selanjutnya akan lebih sempurna dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan dan pengembangan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Desember 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar

dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes
NIP. 19600105 198511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Landasan Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	8
A. Keadaan Geografi	8
B. Keadaan Penduduk	9
C. Gambaran Dinas Kesehatan	10
D. Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12
BAB III ANALISA SITUASI SDM KESEHATAN	15
BAB IV DESKRIPSI PENGADAAN SDM KESEHATAN	16
BAB V DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	17
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU SDM KESEHATAN	18
BAB VII PENUTUP	20
A. Simpulan	20
B. Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai Rencana Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, maka pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan cara: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan, 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, 3) Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan, 4) Melaksanakan pelayanan administrasi internal dan pelayanan publik yang bermutu.

Pelaksanaan pelayanan publik yang bermutu diantaranya adalah pelayanan informasi yang meliputi pelayanan kehumasan dan informasi publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di bidang kesehatan, dibutuhkan adanya manajemen dan pengelolaan data dan informasi kesehatan yang baik, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Peran data dan informasi kesehatan menjadi sangat penting dan semakin dibutuhkan dalam manajemen kesehatan oleh berbagai pihak. Masyarakat semakin peduli dengan situasi kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama terhadap masalah-masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kesehatan mereka.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Kabupaten Karanganyar yang kedua maka perlu mengetahui gambaran keadaan khususnya di Kabupaten Karanganyar, maka perlu disusun Dokumen "*Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan*" Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemetaan SDM Kesehatan perlu di-*update* setiap tahun, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah/ketersediaan dan distribusi data tenaga kesehatan di kabupaten Karanganyar.

Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Karanganyar tahun 2019 ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung sistem manajemen kesehatan yang lebih baik dalam rangka pencapaian Visi Dinas Kesehatan yaitu "**Motor Penggerak Terwujudnya Karanganyar Sehat yang Mandiri**".

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran/deskripsi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui cakupan indikator Renstra Kemenkes Tahun 2019
- b. Mengetahui cakupan indikator Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
- c. Mengetahui jumlah/ketersediaan, kualifikasi dan penyebaran SDM kesehatan di berbagai unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Sebagai bahan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan khususnya pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal di puskesmas dan rumah sakit.
- e. Mengetahui jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sudah teregistrasi, mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) dan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai bahan untuk pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan di Jawa Tengah

C. METODE

Metode yang digunakan sebagai Instrumen pemetaan data SDM Kesehatan adalah aplikasi online Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (*si-sdmk*) dari Kementerian Kesehatan tahun 2019.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengumpulan data adalah sarannya meliputi sarana pelayanan kesehatan dan unit kerja kesehatan lainnya sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Instalasi Perbekalan Farmasi.
3. UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar.
4. Rumah Sakit Umum maupun Khusus baik milik pemerintah Daerah (RSUD) TNI/POLRI maupun milik swasta.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Karanganyar; Klinik Pratama dan Klinik Utama milik Pemerintah maupun milik Swasta.
6. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang
 - a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
 - d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian
 - b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/ kota
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan, epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawatat gigi, nutrisionis, bidan, perawat, radiografer, perekam medis dan teknis elektromedis.
 - d. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1990 tentang masa bakti dan izin kerja apoteker.
3. Keputusan Presiden
 - a. Keputusan presiden republik Indonesai Nomor 77 Tahun 2000 tentang perubahan keputusan presiden no 23 tahun 1994 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap.
4. Peraturan Menteri Kesehatan
 - Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktek bidan

- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktek perawat.
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan izin Praktek Okupasi Terapis
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Nomor 548/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Registrasi dan Izin Praktek Okupasi Terapis
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 Tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 695/MENKES/PER/VI/2007 Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 184/Menkes/per/II/1995 tentang penyempurnaan pelaksanaan masa bakti dan ijin kerja apoteker
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/2006 Tentang Registrasi dan izin kerja radiografer
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan praktek dokter dan dokter gigi.
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 Tentang registrasi dan praktek terapi wicara
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja di Sarana kesehatan milik Pemerintah

5. Keputusan Menteri Kesehatan

- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/20007 tentang Standar Profesi Gizi
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 373/MENKES/SK/III/20007 tentang Standar Profesi Sanitarian

- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 679/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan.
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain.
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1363/MENKES/SK/VII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis.
- Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2001 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

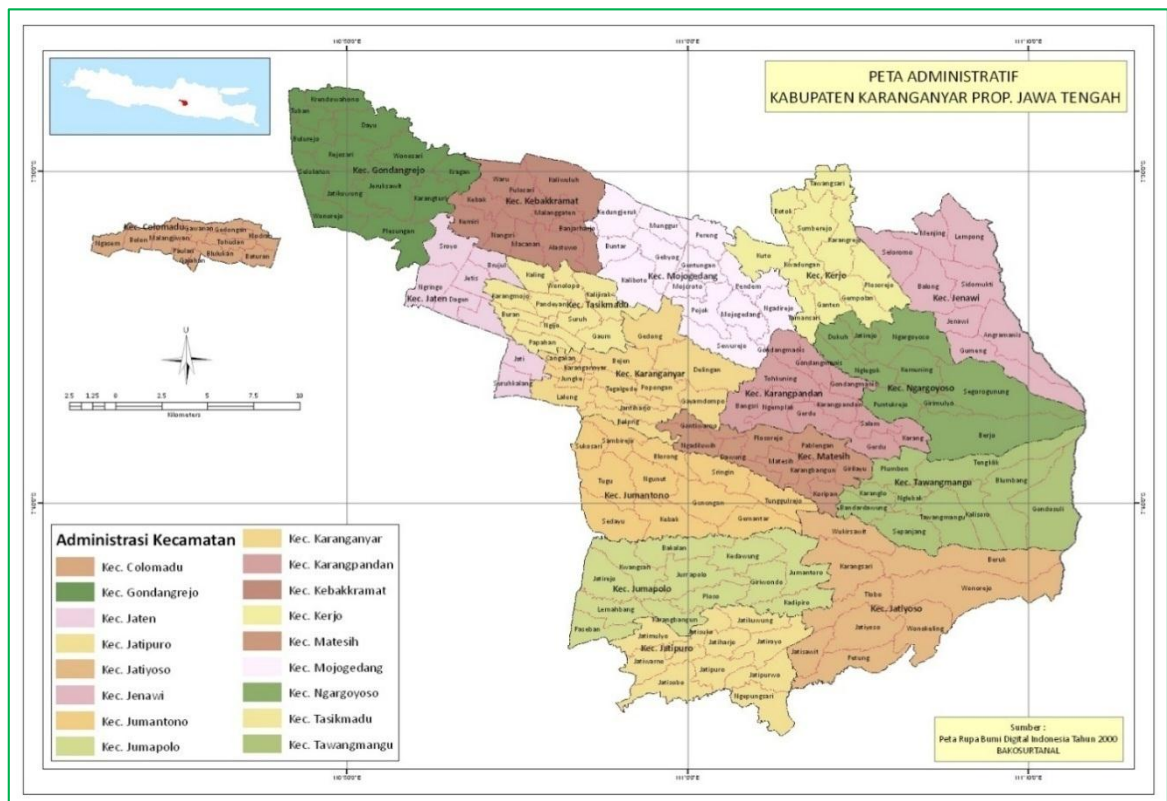
BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

A. KEADAAN GEOGRAFI

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang terletak 110°40' – 100°70' BT dan 7°28' – 7°46' LS. Ketinggian rata – rata 511 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan temperature 22° C – 31° C. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.



Peta Kabupaten Karanganyar

B. KEADAAN PENDUDUK

Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk sebesar 925.811 jiwa. Penyebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Colomadu dengan kepadatan 4.212,40 jiwa per km². Keadaan ini disebabkan karena Colomadu merupakan daerah perkotaan yang mempunyai pelayanan dan fasilitas yang terjangkau. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Jenawi dengan kepadatan 493,85 jiwa per km². Hal ini disebabkan karena Jenawi merupakan daerah pedesaan dan lereng gunung yang jauh dari pusat kota.

Sementara itu jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Karanganyar sebanyak 84.007 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Jenawi sebanyak 27.695 jiwa. Data jumlah penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2018

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	JATIPURO	40,36	18.047	17.671	35.745
2.	JATIYOSO	67,16	20.999	20.581	41.580
3.	JUMAPOLO	55,67	22.320	21.836	44.156
4.	JUMANTONO	53,55	24.898	24.655	49.553
5.	MATESIH	26,27	22.452	22.509	44.961
6.	TAWANGMANGU	70,03	23.997	23.667	47.664
7.	NGARGOYOSO	65,34	18.347	18.234	36.581
8.	KARANGPANDAN	34,11	21.696	22.082	43.778
9.	KARANGANYAR	43,03	41.822	42.185	84.007
10.	TASIKMADU	27,60	31.360	31.899	63.259
11.	JATEN	25,55	40.193	40.656	80.849
12.	COLOMADU	15,64	32.533	33.439	65.882

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
13.	GONDANGREJO	56,80	39.537	38.699	78.236
14.	KEBAKKRAMAT	36,46	32.039	32.538	64.577
15.	MOJOGEDANG	53,31	34.696	34.540	69.236
16.	KERJO	46,82	18.968	19.084	38.052
17.	JENAWI	56,08	13.836	13.859	27.695
JUMLAH		773,8	457.767	458.044	925.811

Sumber : Data Disdukcapil Kab. Karanganyar per 31 Desember 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Karanganyar sebesar 84.007 jiwa, sedang jumlah penduduk terendah di Kecamatan Jenawi sebesar 27.695 jiwa.

C. GAMBARAN DINAS KESEHATAN

Gambaran masyarakat Karanganyar masa depan yang ingin dicapai adalah Karanganyar Sehat yang mandiri dan bertumpu pada potensi daerah, merupakan gambaran masyarakat Karanganyar dimana penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat mampu mengenali masalah kesehatan, merencanakan dan mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi diri sendiri.

Sebagaimana dengan Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 yaitu "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar". Dan sebagaimana Misi Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan perekonomian rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan dan sosial budaya

Guna mendukung visi dan misi Kabupaten Karanganyar khususnya misi no.3 (kesehatan gratis). Maka disesuaikan dengan Misi Dinas Kesehatan yaitu **Motor Penggerak Terwujudnya Karanganyar Sehat yang Mandiri**". Dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui kerjasama antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat
2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
3. Mewujudkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel.
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Dinas Kesehatan masuk dalam kategori tipe A.

Berikut susunan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terdiri dari 4 bidang yang masing-masing terdiri dari tiga seksi, dengan susunan organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Kesehatan Tradisional
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

6. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan
 - b. UPT Instalasi Perbekalan Farmasi
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

D. DATA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Tabel 2.2 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

No	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Dinas Kesehatan	1
2.	UPT Laboratorium Kesehatan	1
3.	UPT Instalasi Perbekalan Farmasi	1
4.	Puskesmas	21
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	1
6.	Rumah Sakit Umum TNI AU	1
7.	Rumah Sakit Swasta	6
8.	Klinik Pratama dan Klinik Utama	46

1. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan sarana pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Puskesmas di Kabupaten Karanganyar terdiri dari

puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, sedangkan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa). Jumlah Puskesmas Kabupaten Karanganyar tahun 2019 yaitu 21 Puskesmas, yang meliputi 15 puskesmas rawat inap dan 6 puskesmas non rawat inap.

Tabel 2.3 : Data Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	JML DESA / KEL	TIPE		JUMLAH JEJARING		
			RAWAT INAP	NON RAWAT INAP	PUSTU	PKD	POSYAN-DU
1	JATIPURO	10	√	-	4	10	88
2	JATIYOSO	9	√	-	2	9	89
3	JUMAPOLO	12	√	-	4	12	104
4	JUMANTONO	11	√	-	4	8	75
5	MATESIH	9	√	-	3	8	87
6	TAWANGMANGU	10	√	-	3	10	66
7	NGARGOYOSO	9	√	-	3	8	67
8	KARANGPANDAN	11	√	-	4	9	69
9	KARANGANYAR	12	-	√	2	12	94
10	TASIKMADU	10	-	√	3	6	78
11	JATEN I	5	√	-	3	4	45
12	JATEN II	3	-	√	3	3	37
13	COLOMADU I	6	√	-	1	5	47
14	COLOMADU II	5	√	-	2	5	43
15	GONDANGREJO	13	√	-	3	11	128
16	KEBAKKRAMAT I	5	√	-	1	6	35
17	KEBAKKRAMAT II	5	-	√	1	5	34
18	MOJOGEDANG I	7	-	√	2	7	63
19	MOJOGEDANG II	6	-	√	2	6	39
20	KERJO	10	√	-	4	6	68
21	JENAWI	9	√	-	3	8	46
TOTAL		177	15	6	58	158	1.402

2. Rumah Sakit

Tahun 2018 di Kabupaten Karanganyar jumlah seluruhnya berjumlah 8 buah dengan perincian 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 Rumah Sakit milik TNI AU, dan 6 Rumah Sakit milik swasta yaitu RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, RS Jati Husada, RS Jafar Medika dan RS. Indo Sehat, RSIA Dian Pertiwi (Rumah Sakit Ibu Dan Anak) dan RS Mojosongo 2.

Tabel 2.4 : Data Rumah Sakit Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

NO	NAMA	TYPE/ KELAS	ALAMAT
1	RSUD Karanganyar	C	Jl. Yos Sudarso Karanganyar
2	RS Lanud Adi Sumarmo	D	Jl. Tentara Pelajar, Colomadu Karanganyar
3	RS PKU Muhammadiyah	C	Jl. Raya Papahan, Tasikmadu, Karanganyar
4	RS Jati Husada	D	Jl. Raya Solo-Tawangmangu KM. 10,3 Jaten, Karanganyar
5	RS Jafar Medika	D	Jl. Raya Mojogedang RT 09, RW 04, Munggur, Mojogedang Karanganyar
6	RS Indo Sehat	D	Jl. Raya Solo-Sragen KM 11, Kebakkramat, Karanganya
7	RS Mojosongo 2	D	Jl. Nusa Indah Randurejo, Ngringo, Jaten, Karanganyar
8	RSIA Dian Pertiwi	Khusus	Jl. Raya Solo-Tawangmangu, Papahan, Karanganyar

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Karanganyar meliputi apotek, klinik, dan praktek dokter mandiri. Fasilitas pelayanan ini sebagai pendukung serta alternatif pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tabel 2.5 menggambarkan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.5 : Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

NO	JENIS FASYANKES	JUMLAH
1	Apotek	138
2	Klinik	46
3	Praktek Dokter Mandiri	142
4	Praktek Dokter Gigi Mandiri	36
5	Praktek Pengobatan Tradisional	47

BAB III
ANALISA SITUASI SDM KESEHATAN

A. DATA KEADAAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN RUMPUN

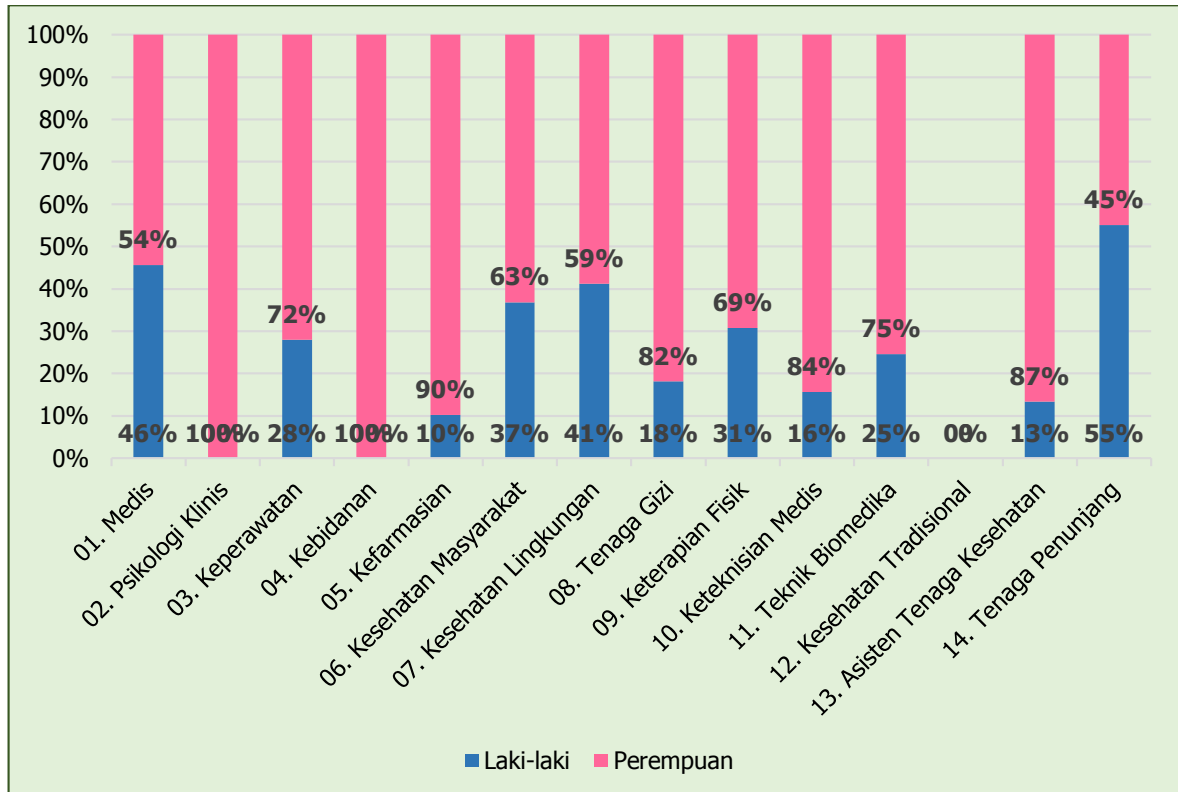
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM Kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Adapun tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan. Berikut gambaran data Sumber Daya Manusia Kesehatan per Rumpun dengan value jenis kelamin di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 : SDM Kesehatan Berdasarkan Rumpun Kab Karanganyar Tahun 2019

RUMPUN SDMK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
01. Medis	141	168	309
02. Psikologi Klinis	0	1	1
03. Keperawatan	257	663	920
04. Kebidanan	0	632	632
05. Kefarmasian	17	149	166
06. Kesehatan Masyarakat	14	24	38
07. Kesehatan Lingkungan	21	30	51
08. Tenaga Gizi	8	36	44
09. Keterampilan Fisik	16	36	52
10. Keteknisian Medis	20	108	128
11. Teknik Biomedika	29	89	118
12. Kesehatan Tradisional	-	-	-
13. Asisten Tenaga Kesehatan	2	13	15
14. Tenaga Penunjang	400	326	726
TOTAL	925	2.275	3.200

Berdasarkan tabel 3.1 diatas diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki total 3.200 orang SDM Kesehatan. Berikut grafik perbandingan rasio jenis kelamin Tenaga Kesehatan Berdasarkan Rumpunnya dari tabel 3.1 diatas.

Grafik 3.1 : SDM Kesehatan Berdasarkan Rumpun Kab Karanganyar Tahun 2019



Berdasarkan grafik 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin perempuan lebih mendominasi pada beberapa rumpun kesehatan. Secara keseluruhan, rasio laki-laki dan perempuan SDM Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 adalah 3:7.

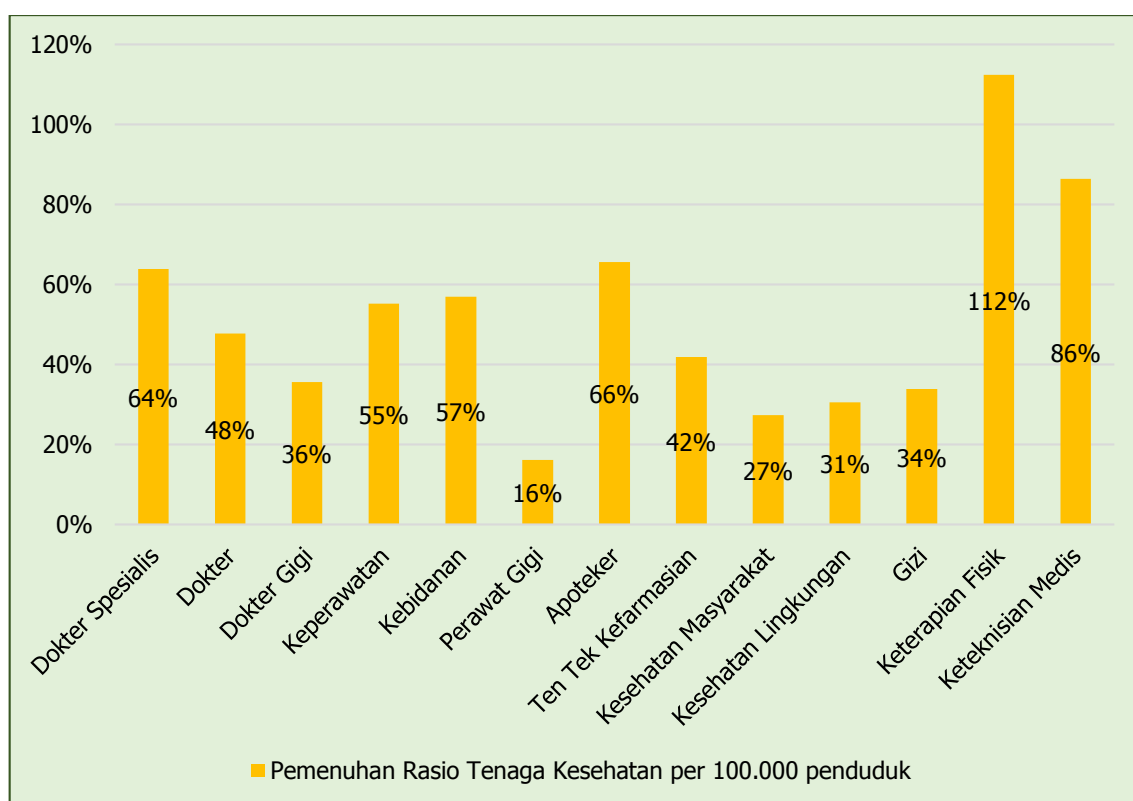
B. DATA SDM KESEHATAN BERDASARKAN WILAYAH

Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk sebesar 925.811 jiwa. Penyebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan.

Tabel 3.2 : Rasio SDMK dengan jumlah Penduduk Kab Karanganyar Tahun 2019

No.	Rumpun SDMK	Jenis Kelamin			Rasio (per 100.000 penduduk)	Target Rasio
		L	P	Jumlah		
1	Dokter Spesialis	44	21	65	7,02	11
2	Dokter	82	117	199	21,49	45
3	Dokter Gigi	15	28	43	4,64	13
4	Keperawatan	257	663	920	99,37	180
5	Kebidanan	0	632	632	68,26	120
6	Perawat Gigi	4	23	27	2,92	18
7	Apoteker	11	62	73	7,88	12
8	Ten Tek Kefarmasian	6	87	93	10,05	24
9	Kesehatan Masyarakat	14	24	38	4,10	15
10	Kesehatan Lingkungan	21	30	51	5,51	18
11	Gizi	8	36	44	4,75	14
12	Keterampilan Fisik	16	36	52	5,62	5
13	Keteknisian Medis	20	108	128	13,83	16

Tabel 3.2 : Grafik Pemenuhan Rasio SDMK dengan jumlah Penduduk Kab Karanganyar Tahun 2019



Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 menggambarkan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dibandingkan dengan Permenkokesra No 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025. Berdasarkan grafik dan tabel tersebut diketahui bahwa hanya ada 1 (satu) rumpun tenaga kesehatan yang memenuhi target rasio, yaitu Rumpun Keterampilan Fisik. Namun ketersediaan tenaga kesehatan pada rumpun lainnya masih jauh dari target rasio tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

C. DATA SDM KESEHATAN BERDASARKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Tabel 3.3 : Keadaan SDM Kesehatan Kab Karanganyar Tahun 2019

No	Jenis SDM	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar				
		PNS	PPPK	KONTAK DAERAH	BLUD	Jml
1	KEPALA DINAS	1				1
2	SEKRETARIS	1				1
3	KEPALA BIDANG	3				3
4	KASUBAG/KASI	14				14
5	KESEHATAN MASYARAKAT	18		2		20
6	KESEHATAN LINGKUNGAN	4				4
7	GIZI	1				1
8	BIDAN	2				2
9	PERAWAT	1				1
10.	DUKUNGAN MANAJEMEN	42		2		44
	JUMLAH	87		4		91

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memiliki total 91 orang SDM Kesehatan, antara lain tenaga PNS sejumlah 87 orang, tenaga kontrak daerah sejumlah 4 orang. Saat ini masih ada kekosongan formasi pada 2 (dua) Jabatan Struktural yakni Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2. SDM Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Karanganyar

Tabel 3.4 : Keadaan SDM Rumah Sakit Kab Karanganyar Tahun 2019

Rumpun SDM Kesehatan	RSUD Karanganyar		RSAU dr. Siswanto		RS PKU Muhammadiyah		RSIA Dian Pertiwi		RSU Jati Husada		RS Indo Sehat		RS Jafar Medika		RS Moosongo II		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Medis	23	23	11	3	5	6	5	3	11	11	7	4	4	4	10	5	135
- Dokter	7	9	7	2	1	1	1	2	1	5	2	2	1	4	1	3	50
- Dokter Gigi	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	9
- Dokter Spesialis	16	10	3	1	4	3	4	1	1	2	5	1	2	0	9	2	74
- Dr Gigi Spesialis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keperawatan	72	184	9	35	49	86	0	17	8	22	3	12	0	0	4	14	517
Kebidanan	0	73	0	6	0	13	0	14	0	11	0	3	0	0	0	0	120
Kefarmasian	0	33	0	8	1	12	0	3	1	3	1	1	0	0	2	5	70
- Apoteker	0	12	0	1	1	5	0	2	1	1	1	1	0	0	2	1	28
- TT Kefarmasian	0	21	0	7	0	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	42
Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kesehatan Lingkungan	2	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10

Rumpun SDM Kesehatan	RSUD Karanganyar		RSAU dr. Siswanto		RS PKU Muhammadiyah		RSIA Dian Pertiwi		RSU Jati Husada		RS Indo Sehat		RS Jafar Medika		RS Moosongo II		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Tenaga Gizi	2	2	0	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	13
Keterampilan Fisik	6	5	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20
- Fisioterapis	6	4	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19
- Okupasi Terapis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keteknisian Medis	3	21	1	1	5	3	0	2	0	7	1	2	0	0	1	2	49
- Perekam Medis	3	19	0	0	4	3	0	2	0	7	1	2	0	0	0	2	43
Teknik Biomedika	11	21	4	7	2	11	0	0	2	3	0	0	0	0	1	3	57
- Radiografer	4	2	3	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	16
- Elektromedis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
- Ahli Tek Lab Medik	5	19	1	7	2	8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	48
Kesehatan Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Penunjang	87	65	41	10	70	59	7	3	0	1	6	1	0	0	6	16	382

3. SDM Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Karanganyar

Tabel 3.5 : Keadaan SDM Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

No	UNIT KERJA	DOKTER		DOKTER GIGI		PERAWAT		PERAWAT GIGI		BIDAN		APOTEKER		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN		KESEHATAN MASYARAKAT		KESEHATAN LINGKUNGAN		TENAGA GIZI		KETERAPAN FISIK		KETERKISIAN MEDIS		TEKNIK BIOMEDIKA		DUKUNGAN MANAJEMEN		JUMLAH TOTAL	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NIN PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	JATIPURO	3	0	1	0	4	7	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	8	22	17
2	COLOMADU 1	3	0	1	0	6	0	1	0	17	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	6	3	40	6
3	COLOMADU 2	3	0	2	0	6	3	1	0	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7	31	10
4	GONDANGREJO	4	0	1	0	7	9	0	0	21	1	3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	6	43	18	
5	KEBAKKRAMAT 1	3	0	1	0	7	9	0	0	20	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	42	15
6	KEBAKKRAMAT 2	3	0	1	0	7	0	1	0	17	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	4	36	6
7	MOJOGEDANG 1	2	0	1	0	6	3	1	0	15	4	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5	7	35	15
8	MOJOGEDANG 2	2	0	1	0	4	1	0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	29	4
9	KERJO	3	0	1	0	2	4	0	1	14	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1	0	2	8	28	20
10	JATEN 2	2	0	1	0	3	1	1	0	13	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	28	4
11	JATEN 1	2	0	1	0	9	4	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	4	31	11
12	TASIKMADU	4	0	1	0	7	2	1	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	0	7	3	40	9
13	JATIYOSO	3	0	1	0	14	2	0	0	15	7	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	38	14
14	JUMAPOLO	4	0	1	0	7	6	1	0	16	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	7	36	16
15	JUMANTONO	2	0	1	0	6	4	1	0	18	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	3	4	39	14
16	MATESIH	3	0	1	0	11	7	0	0	12	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	2	39	11
17	TAWANGMANGU	3	0	1	0	6	5	1	0	15	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	5	35	14
18	NGARGOYOSO	4	0	1	0	8	2	1	0	18	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	3	4	41	9
19	KARANGPANDAN	2	0	2	0	8	2	0	0	19	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	1	0	6	5	44	10
20	KARANGANYAR	3	0	1	0	5	0	0	0	20	2	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	1	1	1	7	4	42	11
21	JENAWI	2	0	1	0	8	4	0	0	13	4	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	6	33	15
Jumlah		60	0	24	0	141	75	10	1	316	41	16	1	13	1	10	3	21	4	16	1	14	9	22	9	16	2	77	98	756	245

4. SDM Kesehatan di Klinik Kabupaten Karanganyar

Salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar adalah Klinik. Klinik di Kabupaten Karanganyar berjumlah 46 unit meliputi Klinik Pratama dan Klinik Utama, baik klinik Rawat Inap dan klinik Non Rawat Inap, milik pemerintah maupun swasta. Tabel 3.6 di bawah ini menggambarkan situasi SDM Kesehatan yang terdapat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Klinik di Kabupaten Karanganyar tahun 2019.

Tabel 3.6 : Keadaan SDM Klinik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Rumpun SDM Kesehatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
	L	P	
Medis	55	85	140
- Dokter	51	71	122
- Dokter Gigi	2	12	14
- Dokter Spesialis	2	2	4
Psikologi Klinis	0	0	0
Keperawatan	20	101	121
Kebidanan	0	119	119
Kefarmasian	4	37	41
- Apoteker	4	25	29
- TT Kefarmasian	0	12	12
Kesehatan Masyarakat	2	5	7
Kesehatan Lingkungan	4	7	11
Tenaga Gizi	2	7	9
Keterampilan Fisik	1	3	4
- Fisioterapis	1	2	3
- Akupuntur	1	0	1
Keteknisian Medis	0	17	17
- Perekam Medis	0	16	16
- Terapis Gigi Mulut	0	1	1
Teknik Biomedika	2	6	8
- Ahli Tek Lab Medik	2	6	8
Kesehatan Tradisional	0	0	0
Tenaga Penunjang	34	42	76

Berdasarkan tabel 3.6 diatas diketahui bahwa dari jumlah total 46 klinik yang ada di Kabupaten Karanganyar, ada beberapa klinik yang belum memiliki SDM Kesehatan pada rumpun Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Perkam Medis, dan Kesehatan Tradisional.

BAB IV

DESKRIPSI PENGADAAN SDM KESEHATAN

Pengadaan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan (pasal 25). Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pengadaan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Pedoman yang terkait dengan pengadaan tenaga kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah.

A. SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karanganyar yang dideskripsikan dalam dokumen Profil SDM Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 terdiri dari 21 Puskesmas, 8 Rumah Sakit dan 46 Klinik, dengan rincian sebagai berikut :

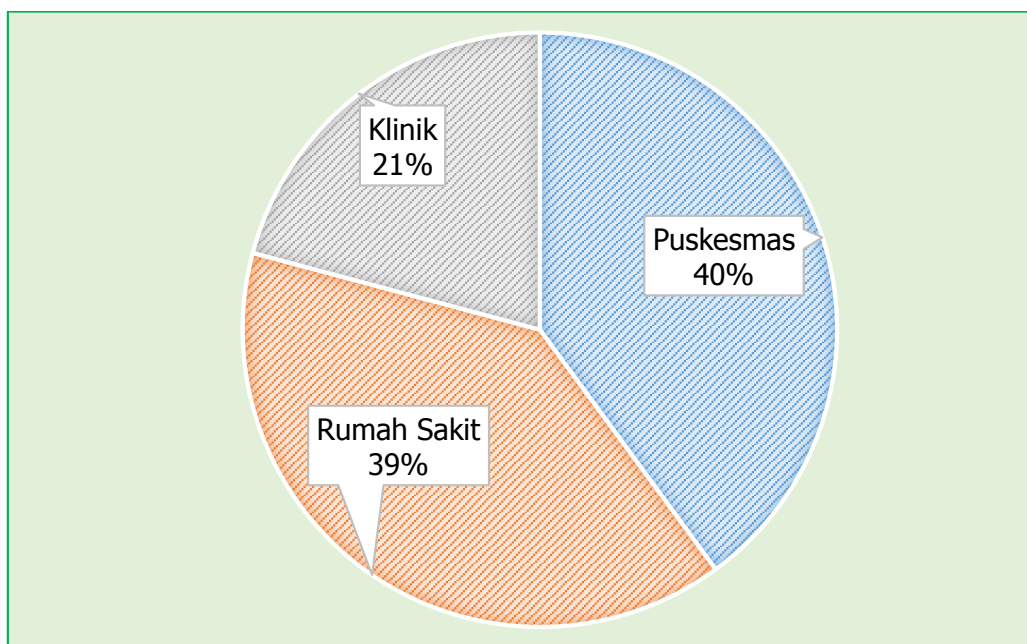
Tabel 4.1 : Keadaan Tenaga di Kabupaten Karanganyar Per sarana kesehatan dan per jenis tenaga Tahun 2019

Rumpun SDM Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Puskesmas	RS	Klinik
Medis	85	135	140
- Dokter	61	50	122
- Dokter Gigi	24	9	14
- Dokter Spesialis	0	74	4
Psikologi Klinis	1	2	0
Keperawatan	239	0	121
Kebidanan	388	517	119

Rumpun SDM Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Puskesmas	RS	Klinik
Kefarmasian	37	120	41
- Apoteker	16	70	29
- TT Kefarmasian	21	28	12
Kesehatan Masyarakat	13	42	7
Kesehatan Lingkungan	27	1	11
Tenaga Gizi	20	10	9
Keterampilan Fisik	26	13	4
Keteknisian Medis	52	1	17
Teknik Biomedika	26	57	8
JUMLAH	914	898	477

Dari tabel 4.1 diatas belum termasuk SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan, UPT Laboratorium dan UPT Instalasi Perbekalan Farmasi (IPF). Berikut Grafik persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar

Grafik 4.1: Persebaran tenaga kesehatan Kabupaten Karanganyar



Berdasarkan grafik 4.1 diatas diketahui bahwa sebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar terbanyak adalah pada Puskesmas 40% (914 orang), dan paling sedikit pada Klinik 21% (477 orang).

B. INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Institusi Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 institusi pendidikan kesehatan yaitu Akademi Kebidanan Mitra Husada, Apikes Mitra Husada dan Akademi Perawat 17 Agustus Karanganyar, dari ketiga institusi tersebut semuanya adalah milik swasta.

2. Jumlah Tenaga Pengajar

Jumlah dosen dari 3 institusi kesehatan tersebut sebanyak 60 orang. Tingkat pendidikan dosen yang paling banyak adalah S-1 sebanyak 37 orang dan paling sedikit tingkat pendidikan S-3 yaitu 1 orang.

Untuk dapat menyajikan deskripsi pengadaan SDM Kesehatan, indikator-indikatornya sebagai berikut :

1. Jumlah dan persebaran jurusan di Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
2. Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menghasilkan tenaga kesehatan.
3. Jumlah persebaran institusi berdasarkan status kepemilikan.
4. Rekapitulasi strata akreditasi jurusan/program studi.
5. Rekapitulasi penyelenggaraan dan pemprakarsa program khusus.
6. Jumlah peserta didik per jenis tenaga kesehatan.
7. Jumlah lulusan per jenis tenaga kesehatan.
8. Jumlah peserta didik program khusus.
9. Jumlah tenaga pengajar diknakes berdasarkan latar belakang pendidikan.
10. Jumlah pelatihan teknis kesehatan bagi kader kesehatan berdasarkan jenis pelatihan, jumlah peserta dan penyelenggaranya.
11. Jumlah tenaga pendidik/pengajar yang memiliki sertifikasi dosen.
12. Jumlah tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan TOT teknis kesehatan dan pelatihan yang berskala nasional.
13. Jumlah dan persebaran program studi Poltekkes.
14. Jumlah dan persebaran program studi DIV kesehatan.

15. Rekapitulasi penyelenggaraan dan pemrakarsa program khusus.
16. Jumlah peserta didik per jenis tenaga kesehatan.
17. Jumlah lulusan per jenis tenaga kesehatan.
18. Jumlah lulusan Poltekkes menurut jenjang pendidikan dan gender.
19. Jumlah pelatihan berdasarkan jenis pelatihan (penjenjangan, manajemen, teknis dan fungsional) untuk SDM Kesehatan.
20. Jumlah peserta pelatihan berdasarkan jenis pelatihan.

Berikut data tenaga pengajar institusi pendidikan kesehatan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis tenaga :

Tabel 4.2 : Tenaga Pengajar Institusi Pendidikan Kabupaten Karanganyar

NO	INSTITUSI	JENIS TENAGA	JUMLAH
1.	STIKES MITRA HUSADA	Staf Dosen Pengajar	37
		Staf Kehumasan	6
		Tenaga Lainnya	11
2.	APIKES MITRA HUSADA	Staf Dosen Pengajar	14
		Tenaga Lainnya	9
3.	AKPER 17 KARANGANYAR	Staf Dosen Pengajar	17
		Staf Kehumasan	5
		Tenaga Lainnya	7

Jumlah staf dosen pengajar di institusi pendidikan sebanyak 68 dosen yang tersebar di institusi pendidikan Stikes Mitra Husada sebanyak 37 dosen pengajar, Apikes Mitra Husada sebanyak 14 dosen pengajar dan Akper 17 Karanganyar sebanyak 17 dosen pengajar.

BAB V

DESKRIPSI PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

Pendayagunaan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Penempatan tenaga kesehatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Pada pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Selain itu pemerintah daerah dapat mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerahnya.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan kesehatan, Departemen Kesehatan sejak beberapa dasawarsa terakhir telah mendidik bermacam-macam jenis profesi tenaga kesehatan. Pada awalnya berbagai profesi tersebut memang diadakan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun dalam perkembangannya kebutuhan akan tenaga kesehatan juga mempertimbangkan tuntutan pasar dan kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai negara yang tengah membangun dan mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan, Indonesia perlu penataan ulang pendayagunaan tenaga kesehatan yang telah ada atau yang masih akan dikembangkan

Pendayagunaan SDM kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan pengangkatan pegawai permanen (PNS), semi permanen (PTT pusat dan daerah), temporer (kontrak/honorar dan residen), penempatan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI) di luar negeri, dan pada beberapa institusi pelayanan kesehatan milik swasta telah melakukan pendayagunaan tenaga kesehatan asing.

A. PROGRAM INTERSHIP

Program Intership Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan ke profesional pra registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar dan dilaksanakan selama 1 tahun yaitu 8 bulan di Rumah Sakit dan 4 bulan di Puskesmas.

Peraturan-peraturan yang menyangkut Program Internsip terdapat pada Permenkes No. 229/ Menkes/PER/II/2010 yang menyatakan bahwa "Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik lapangan". Sedangkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertanggung jawab dalam memberikan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi para dokter/dokter gigi agar bisa menjalankan praktek menyatakan "Internship adalah pelatihan keprofesian berbasis kemandirian pada pelayanan primer guna memahirkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan menerapkan standar profesi pada praktik kedokteran setelah selesai pendidikan dokter dan uji kompetensi" (Perkonsil Nomor 1/KKI/PER/I/2010).

B. PEGAWAI HONORER/ KATEGORI II (K2) / KONTRAK / THL

Ada juga pegawai honorer yang itu di biyai dari anggaran APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2019. Berikut persebaran tenaga honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar di UPT Puskesmas tahun 2019.

Tabel 5.2 : Persebaran Tenaga Kontrak THL Dinas Kesehatan

NO	PUSKESMAS	JUMLAH
1	Jatipuro	12
2	Jatiyoso	16
3	Jumapolo	14
4	Jumantono	8
5	Matesih	7
6	Tawangmangu	16
7	Ngargoyoso	8
8	Karangpandan	12
9	Karanganyar	6
10	Tasikmadu	3
11	Jaten I	11

NO	PUSKESMAS	JUMLAH
12	Jaten II	2
13	Colomadu I	2
14	Colomadu II	3
15	Gondangrejo	23
16	Kebakkramat I	12
17	Kebakkramat II	5
18	Mojogedang I	5
19	Mojogedang II	4
20	Kerjo	11
21	Jenawi	8

Guna untuk menunjang pelayan di UPT Puskesmas dan untuk persyaratan pemenuhan tenaga untuk akreditasi di UPT Puskesmas, maka perlu mengangkat tenaga kontrak/honorar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU SDM KESEHATAN

Salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Tujuan utama pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standarisasi, sertifikasi dan lisensi, dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan dan pemerintah daerah.

A. STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Salah satu upaya pembinaan dan pengawasan mutu terhadap tenaga kesehatan adalah melalui standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan.

1. Standar Profesi Tenaga Kesehatan

Berdasarkan PP Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok dan 27 jenis tenaga kesehatan, antara lain Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi), Tenaga Keperawatan (Perawat, Bidan), Tenaga Kefarmasian (Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker), Tenaga Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian), Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien), Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapi, Okupasi Terapis, Terapis Wicara), Tenaga Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfusi, Perekam Medis).

2. Setifikasi Dan Lisensi

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi). Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Sertifikat kompetensi di keluarkan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI). Hal tersebut diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, yakni uji kompetensi bagi tenaga kesehatan, pemberian STR dan pembinaan praktik atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seseorang tenaga kesehatan harus benar-benar teruji kompetensinya melalui hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI). Dalam pelaksanaannya MTKI akan dibantu oleh Majelis Tenaga Kerja Propinsi (MTKP). Sasaran dari uji kompetensi sertifikasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI) adalah semua tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Farmasi, yang antara lain : Perawat, Bidan, Fisioterapi, Perawat Gigi, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Analis Kesehatan, Perawat Anestesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortosis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler serta Ahli Kesehatan Masyarakat.

DATA SDM KESEHATAN YANG MEMILIKI STR DAN SIP

Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi). STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sedangkan Surat Izin Praktik/ Kerja (SIP/ SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Tabel 6.1 menggambarkan data rekapitulasi izin dan registrasi tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data yang masuk dari fasyankes.

Tabel. 6.1 : Rekapitulasi Izin Tenaga Kesehatan Kab Karanganyar Tahun 2019

No.	Rumpun SDM	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	Dokter Spesialis	44	21	65
2	Dokter	82	117	199
3	Dokter Gigi	15	28	43
4	Keperawatan	257	663	920
5	Kebidanan	0	632	632
6	Perawat Gigi	4	23	27
7	Apoteker	11	62	73
8	Ten Tek Kefarmasian	6	87	93
9	Kesehatan Lingkungan	21	30	51
10	Gizi	8	36	44
11	Keterampilan Fisik	16	36	52
12	Keteknisian Medis	20	108	128

Bila dilihat dari tabel 6.1 diatas bahwa Izin yang paling banyak adalah untuk tenaga Perawat sebanyak 920 izin, sedangkan yang kedua adalah tenaga Bidan sebanyak 632 izin, untuk tenaga dokter sebanyak 199 izin. Semua Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) telah dipastikan bahwa tenaga kesehatan tersebut memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang valid dan berlaku.

B. DATA SDM KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIDAYAGUNAKAN DI FASYANKES KABUPATEN KARANGANYAR

Kebijakan yang mengatur tentang pendayagunaan tenaga kerja asing di bidang kesehatan sangat terkait dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan imigrasi secara khusus di bidang kesehatan, yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia.

Di Kabupaten Karanganyar mapping data TKWNA telah dilaksanakan dan sampai dengan tahun 2019 ini Kabupaten Karanganyar belum mempunyai TKWNA / SDM Kesehatan berkewarganegaraan Asing.

C. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, perlu diupayakan peningkatan potensi dan kualitas SDM Kesehatan salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan SDM Kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti tugas belajar sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan membuka peluang bagi sumber daya manusia kesehatan untuk bisa mendapatkan program tugas belajar dalam negeri. Program-program yang disediakan antara lain : Program Diploma Empat (D-IV) Mitra Spesialis, Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3).

Berdasarkan Permenkes No. 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) Kemenkes telah menyediakan dana bagi dokter umum dan dokter gigi untuk melanjutkan pendidikan spesialis (PPDS/PPDGS). Hal ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat daerah. Upaya ini utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis 4 dasar (Bedah, Obstetri dan Ginealogi, Penyakit dalam dan Kesehatan Anak), serta 4 penunjang (Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik, Rehabilitas Medik) dan dokter spesialis lainnya di daerah. Untuk melaksanakan program PPDS/PPDGS Kemenkes bekerja sama dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), 17 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Indonesia, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Rumah Sakit Pendidikan, peserta program ini adalah baik PNS maupun non PNS.

BAB VII

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 disusun dengan mengoptimalkan kontribusi seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
2. Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 mencakup :
 - a.) Dinas Kesehatan
 - b.) 21 UPT Puskesmas
 - c.) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
 - d.) UPT Instalasi Perbekalan Farmasi
 - e.) Rumah Sakit milik pemerintah (RSUD dan RS AU)
 - f.) 46 Unit Klinik (baik milik pemerintah maupun swasta)
3. Metode yang digunakan sebagai Instrumen pemetaan data SDM Kesehatan adalah aplikasi online Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (*si-sdmk*) dari Kementerian Kesehatan tahun 2019.

B. REKOMENDASI

1. Dokumen Profil SDM Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 diharapkan menjadi gambaran perkembangan kontinyu yang dapat dipantau. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mendatang.
2. Untuk meningkatkan kualitas deskripsi data SDM Kesehatan di Kabupaten Karanganyar, kegiatan pengumpulan data dapat diperluas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya seperti Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Praktek Tenaga Kesehatan Mandiri, Balai Kecantikan, dsb.
3. Peningkatan kualitas dokumen akan terus dilaksanakan dengan meningkatkan data dan informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan sehingga diharapkan data dan informasi yang diperoleh menjadi lengkap, akurat dan tepat waktu.